

Representasi dan Relasi Kuasa Patriarki pada Toponomi Jalan di Jakarta²⁵

Zeffry Alkatiri

zeffry_al@yahoo.com

Abstrak

Makalah ini akan mengungkapkan pengaruh pola Patriarki dalam toponimi nama-nama jalan di Jakarta. Makalah ini didasari oleh riset lapangan awal yang secara kualitatif memperlihatkan bahwa kota Jakarta belum memberikan ruang yang layak bagi kaum perempuan. Salah satunya dapat dilihat dari penamaan jalan. Hampir 90% nama jalan di Jakarta didominasi oleh nama lelaki. Hal itu terjadi sejak periode kemerdekaan yang bertahan sampai sekarang. Makalah ini akan menjawab permasalahan bahwa kota Jakarta secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketidakimbangan gender dalam toponomi nama jalan, yang umumnya didominasi oleh pola patriarki.

Kata Kunci: toponomi, patriarki, Jakarta

Pembuka

Benarkah Jakarta sebagai kota kaum lelaki? Bisa jadi ada benarnya. Di mana letak kebenarannya? Lihat saja secara gender kota Jakarta belum memberikan ruang yang layak bagi kaum perempuan. Di mana itu dapat dilihat? Salah satunya dapat dilihat dari penamaan jalan. Hampir 90% nama jalan di Jakarta didominasi oleh nama lelaki. Hal itu terjadi sejak periode kemerdekaan. Hampir semua nama jalan di Jakarta yang sebelumnya menggunakan nama-nama Belanda diganti dengan nama jalan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar kemudian diganti dengan nama-nama pahlawan nasional. Dan yang sesungguhnya di Indonesia tokoh pahlawan itu lebih banyak berasal dari kaum lelaki daripada kaum perempuannya. Baru setelah dikaji adanya beberapa pahlawan dari kaum ibu, maka sebagai penghargaan mereka diterakan untuk nama jalan dan itu pun sampai sekarang masih dapat dihitung dengan jari, di antaranya adalah Jalan Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah, Radin Intan, dan Jalan Rasuna Said.

Keberpihakan kepada kaum lelaki di wilayah pinggiran Jakarta tampak lebih jelas terlihat. Bagaimana melihatnya? Di beberapa kawasan pinggiran Jakarta dulu banyak

²⁵Makalah ini merupakan pengembangan dari artikel saya sendiri berjudul “Kota Kaum Lelaki”, yang pernah dimuat dalam buku *Jakarta Punya Cara* (Masup Jakarta 2012) hal 91-93.

dihuni oleh masyarakat Betawi. Mereka menguasai areal tanah sampai berhektar-hektar. Dulu di wilayah mereka belum ada jalan. Pemda juga kesulitan untuk memberikan nama jalan di wilayah tersebut. Nama jalan kemudian diberikan kepada pemilik tanah yang paling luas, yang paling kesohor, dan yang paling lama tinggal di situ yang tanahnya kemudian dijadikan jalan untuk masyarakat. Atas dasar itu, kemudian kebanyakan jalan-jalan di wilayah pinggiran itu ditandai dengan nama-nama mereka yang umumnya bergelar Haji dan bukan Hajah. Hal ini secara langsung menandakan kuatnya budaya patriarki di kalangan masyarakat Betawi. Bahkan model penamaan jalan seperti itu masih ada di wilayah Jakarta Pusat, khususnya wilayah yang dulu bekas tempat pemukiman masyarakat Arab. Dulu nama jalan di daerah itu juga ditandai dengan nama tuan tanah setempat, seperti Jalan Alaydrus dan Jalan Talib yang nama jalannya masih ada sampai sekarang.

Landasan Teoritis

Representasi menjadi focus dalam bidang kajian *cultural studies*, yang selalu mempertanyakan bagaimana produk makna tertentu dikonstruksi oleh suatu relasi kuasa yang mempunyai capital simbolik. Representasi tersebut dapat dilihat dari berbagai elemen tanda-tanda, seperti bahasa, visual, bahkan tindakan tertentu. Berbagai produk makna tersebut pada gilirannya membentuk suatu identitas yang tidak bisa tidak memperlihatkan hasil mekanisme kerja dari suatu otoritas pemegang kekuasaan (Hall 2003: 17 dan 19).

Dalam pandangan para konstruksionis, representasi dilihat sebagai suatu proses di antara anggota kebudayaan tertentu yang bertujuan untuk memproduksi makna. Oleh karena itu, tidak ada makna yang berdiri tetap, sebab dengan adanya perubahan dalam struktur masyarakat, secara tidak langsung akan diproduksi makna-makna baru yang merupakan hasil dari interaksi di antara warganya, sebagai kesepakatan bersama (walau sering kali adanya unsur pemaksaan di dalamnya). Dengan demikian secara tidak sadar warga suatu masyarakat menerima wacana dominan yang diproduksi oleh suatu kelas atau rejim dominan yang memiliki relasi kuasa dalam arena sosial (Hall 2003: 259-261 atau Bourdieu 2012: 71). Ditambahkan oleh Storey (2003: 85 dan 88), bahwa produk makna yang menjadi identitas suatu masyarakat merupakan suatu yang dibentuk dalam konteks

budaya, yang pada gilirannya menjadi *site of memory* atau menjadi memori kolektif dari suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu sulit untuk dihilangkan atau diubah.

Kapital simbolik merupakan faktor penting yang diperlukan untuk merebut arena sosial sebagai arena pertarungan. Mereka akan memperlihatkan diri sebagai pemilik kapital atau sebagai kelas dominan yang memiliki kuasa memproduksi wacana dominan pada ruang publik yang mendistorsi habitus kelas yang terdominasi. Hal itu merupakan hasil dari suatu produksi dan reproduksi kekuasaan yang terus berproses (Bourdieu dalam Haryatmoko 2016: 50 -51).

Ruang publik sebagai arena pertarungan merupakan suatu tempat yang memperlihatkan mekanisme interaksi antara yang mampu keluar sebagai penguasa dan pihak yang kalah dalam bentuk pertukaran, layaknya pasar. Arena sebagai pasar adalah juga tempat para pemilik kapital simbolik berebut pengaruh satu sama lainnya. Dengan demikian ruang publik sebagai arena mencerminkan reposisi interaksi antara kelas dominan dan kelas yang termajinakan (Bourdieu dalam Haryatmoko 2016: 51 dan Bourdieu 2012: xvii-viii).

Berdasarkan landasan teoritis singkat itu, kita dapat memanfaatkannya untuk mengkaji lebih jauh mengenai hubungan toponimi nama-nama jalan dengan relasi kuasa dalam ruang publik, khususnya di Jakarta.

Diskusi

Kelihatannya fenomena toponimi merupakan hal yang sederhana dan biasa serta dianggap wajar. Tetapi kalau ditelusuri ke belakang, akan terlihat adanya relasi kuasa yang mempunyai kapital simbolik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara persuasif maupun paksaan mempengaruhi pembentukan nama-nama yang berkaitan dengan toponimi di daerah tertentu.

Sebagai contoh riset yang dilakukan oleh Sarkawi B. Husein (2010), mengenai perebutan simbol dan nama jalan di Kota Surabaya. Bukanlah suatu yang mudah untuk mengganti suatu nama jalan lama yang sudah melekat dalam memori warga kota dengan nama jalan yang baru. Pihak Pemda sering kali tanpa persetujuan masyarakat mengubah

nama jalan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warganya. Dampak negatifnya tentunya akan merepotkan administrasi para warganya.

Dalam konteks Kolonial Belanda nama jalan dibentuk berdasarkan berbagai kepentingan. Nama jalan di Batavia, khususnya yang berada di area pusat, diberikan kepada nama-nama sejumlah mantan Gubernur Jenderal VOC dan Gubernur Koloni Hindia Belanda. Bahkan sebagai penghargaan tertinggi nama raja dan ratu Belanda juga diterakan untuk nama jalan di Batavia.

Kondisi yang sama juga terjadi ketika periode pendudukan Jepang. Hampir semua nama jalan di berbagai kota-kota besar diubah dengan nama jalan berbahasa Jepang. Hal yang sama juga terjadi pada periode kemerdekaan. Euforia kemerdekaan yang disertai dengan semangat nasionalisme dan patriotisme mendorong untuk mengubah sejumlah nama-nama jalan peninggalan Belanda dan Jepang di berbagai kota besar dengan nama jalan berciri perjuangan dan kepahlawanan. Sebagai contoh ekstrem, nama jalan atau wilayah yang pada masa kolonial bernama Van Heutszboulevard dan Van Heutszplein, sebagai jenderal yang memenangkan Perang Aceh diganti dengan nama Jalan Teuku Umar dan Jalan Tjut Mutiah, yang merupakan lawannya dalam Perang Aceh. Contoh lainnya, nama Jalan Jan Pieterzoon Coenweg diganti dengan nama tokoh lawannya, yakni jalan Sultan Agung. Pergantian itu seperti mengejek dan balas dendam atas kemenangan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Contoh lain yang serupa itu, adalah wilayah atau Jalan Koningsplein yang terletak di depan Istana Hindia Belanda, setelah kemerdekaan diganti menjadi Jalan Medan Merdeka.

Sebagian nama jalan di Jakarta (Batavia) pernah dibentuk oleh *Stadsgemente Batavia* (1910/1920), baik yang terlatak di wilayah kota lama (di daerah Kota-Glodok), maupun nama jalan yang berada di wilayah perluasan mereka, contohnya seperti nama jalan di wilayah Menteng dan pusat kota baru (Lapangan Banteng dan Monas sekarang). Tujuannya untuk mengingatkan pada perjuangan para pahlawan mereka. Walaupun demikian beberapanama jalan dan wilayah lama (prakolonial) yang bersifat tradisional masih tetap dipertahankan. Seperti diungkapkan oleh Rachmat Ruchiat dalam bukunya *Asal Usul Nama Tempat di Jakarta* (2011), bahwa selama pendudukan Belanda di Batavia, berbagai nama jalan dan wilayah lama masih tetap dipertahankan, bahkan nama wilayah

tersebut masih tercantum dalam peta batas kota Batavia sampai tahun 1939. Akibat adanya perubahan nama tersebut sampai sekarang banyak orang yang tidak mengetahui, wilayah mana yang tercantum dalam keputusan *Stadsgemente Batavia* dan wilayah mana yang baru tercantum dalam keputusan pemerintah kota Jakarta. Akhirnya orang menjadi menduga-duga, jangan-jangan wilayah tersebut merupakan hasil bentukan kolonial dan atau telah terbentuk sebelum era kolonial, yang didasarkan atas pengaruh *folklore* Hindu-Budha (Bahasa Sansekerta), Islam (Bahasa Arab), dan Cina (Bahasa Cina).

Jalan merupakan bagian dari tempat umum yang menjadi ruang publik, selain taman, lapangan, dan pasar. Ruang publik yang bersifat umum seperti jalan seringkali menjadi ajang atau arena perebutan dari berbagai pihak, bahkan dalam perebutan itu sering menimbulkan konflik berdarah. Ruang publik seperti jalanan ini umumnya diatur oleh Sosio Order, baik secara formal dalam bentuk aturan tertulis atau berdasarkan konvensi setempat, yang secara langsung memperlihatkan representasi kehadiran pihak yang kuat yang mempunyai relasi kuasa serta mempunyai kapital simbolik (otoritas politik dan pemodal) yang menghegemoni golongan yang lemah.

Berdasarkan paradigma para agen sosial sebagai pemegang kekuasaan, maka setelah kemerdekaan, banyak nama jalan utama (protokol) maupun jalan umum biasa di Jakarta yang pada awalnya berasal dari identitas kolonial telah diganti (diubah) menjadi nama jalan yang berciri identitas keindonesiaan, khususnya diganti dengan nama-nama pahlawan Indonesia. Pemberian nama ini juga terus berlangsung pascaperistiwa berdarah 30 September 1965. Tujuh nama korban pembantaian kemudian disematkan menjadi nama jalan, sebagai suatu bentuk penghargaan dan pengikatan memori kolektif untuk warga Jakarta, bahkan juga disematkan di berbagai kota besar lainnya. Hal ini memperlihatkan bagaimana kuasa moral sebagai pemegang kendali ruang publik memproduksi dan merekonstruksi wacana identitas menjadi produk makna baru, yang berkaitan dengan konteks sosial politik di belakangnya. Ketujuh nama korban itu direproduksi menjadi wacana kepahlawanan, yang semuanya adalah kaum lelaki. Sedangkan seorang anak perempuan bernama Adek Irma Suryani, yang juga menjadi korban hanya disematkan untuk sekolah Taman Kanak-Kanak. Setelah kejadian tersebut, bukan hanya penambahan nama jalan untuk ketujuh korban itu, tetapi juga pergantian nama jalan lama yang

bernuansa Cina diubah menjadi nama jalan berbahasa Indonesia. Contoh ekstremnya adalah nama jalan Toapekong di daerah Glodok diganti menjadi jalan Pintu Besi.

Perkembangan Jakarta yang meluas dan melebar membutuhkan pula sejumlah identitas yang perlu dilekatkan pada sejumlah jalan-jalan baru. Memanfaatkan pendalaman dan kajian terhadap sejarah nasional yang terus berproses, ditemukan beberapa nama tokoh yang diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemegang kuasa kapital untuk diberi penghargaan untuk sejumlah nama jalan baru itu. Kebanyakan dari mereka adalah juga kaum lelaki. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa kuasa kapital yang menguasai ruang publik Jakarta (para birokrat dan legislator) didominasi oleh kaum Patriarki. Jalan sebagai ruang publik juga menjadi ajang perebutan kuasa antara Pemda, sebagai pemegang kendali birokrasi dengan warga kota (warga Betawi). Pada tahun 90-an pernah terjadi konflik dalam perebutan penamaan jalan di wilayah Jakarta Timur, antara Pemda dengan warga Betawi. Pihak warga Betawi mengusulkan dan menghendaki jalan yang baru dibangun diberi nama dengan nama tokoh masyarakat Betawi, tetapi pihak Pemda telah lebih dulu memberikan nama yang tidak mempunyai kaitan dengan sejarah masyarakat Betawi.

Sosio Order ini juga terlihat pada beberapa nama jalan yang umumnya terdapat di wilayah perbatasan atau pinggiran Jakarta. Kuasa kolonial Belanda hanya mampu memberikan identitas nama jalan di wilayah pusat perkotaan. Sementara di wilayah yang belum tergarap, yang masih dihuni kebanyakan oleh warga asli Betawi, sampai era kemerdekaan belum tersentuh untuk direbut oleh para pemegang kendali kapital. Oleh sebab itu, sampai sekarang, mungkin juga dengan semena-mena, di banyak wilayah pinggiran Jakarta yang dulunya masih dihuni oleh warga Betawi ditemukan nama-nama jalan yang didasarkan oleh agen kuasa setempat. Mereka adalah pemegang kuasa kapital yang mampu menghegemoni warga setempat sehingga mau tidak mau terpaksa menerima nama jalan tersebut di atas namakan kakek, buyut, atau bapaknya, yang umumnya diberi identitas kuasa moral dengan gelar Haji. Sekali lagi, mereka adalah kaum patriarki yang menguasai arena ruang publik, yang seakan-akan adalah miliknya. Nama Haji yang diletakkan di depan namanya, memperlihatkan, bukan hanya sebagai simbol kapital, tetapi juga sebagai simbol moral, yang menguasai ruang arena publik wilayah setempat. Tanda-

tanda relasi kuasa tersebut secara tidak langsung telah membentuk memori kolektif warga setempat maupun warga pendatang.

Penutup

Demikianlah, dari uraian di atas dapat diperhatikan bahwa produk budaya yang berkaitan dengan toponimi nama jalanpun tidak terlepas dari representasi kuasa kapital simbolik patriarki yang memproduksi makna-makna sesuai dengan kepentingannya. Toponimi menjadi suatu objek yang tidak terhindarkan untuk dikonstruksi dan didekonstruksi kembali terus menerus oleh berbagai kuasa kapital simbolik yang secara langsung memperlihatkan representasi relasi kuasa patriarki atas arena publik. Dengan demikian secara tidak sadar warga suatu masyarakat menerima wacana dominan yang diproduksi oleh suatu kelas atau rezim dominan yang memiliki relasi kuasa dalam arena sosialnya. Berbagai produk makna yang berbentuk toponimi jalan pada gilirannya menjadi identitas yang dirawat untuk menandai mekanisme kerja dari suatu otoritas pemegang kekuasaan yang berlatar belakang ideologi patriarki, yang bias gender. Kasus seperti itu terlihat dalam penamaan jalan di kota Batavia (pada periode kolonial) dan kemudian Jakarta (sampai dengan sekarang).

Daftar Acuan

- Alkatiri, Zeffry. 2012. "Kota Kaum Lelaki?", dalam *Jakarta Punya Cara*. Depok: Masup Jakarta.
- Bourdieu, Pierre. 2012. *Arena Produksi Kultural*. Yogyakarta: Kreasi.
- Hall, Stuart (ed). 2003. *Representation, Cultural Representation and Signifying Practice*. Sage Publication.
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husein, Sarkawi B. 2010. *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan di Surabaya 1930-1960*. Jakarta: PMB LIPI dan NIOD.
- Ruchiat, Rachmat. 2011. *Asal Usul Nama Tempat di Jakarta*. Depok: Masup Jakarta.
- Storey, John. 2003. *Inventing Populer Culture: From Foklore to Globalization*. Blacwell Publishing.